

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Armen Yasir, 2007. *Hukum Perundang-Undangan*. Bandar Lampung: Pusat Studi Universitas Lampung.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Charles Simabura. 2011. *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismail Hasani & A. Gani Abdullah. 2006. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iwan Satriawan. 2003. *Thesis of Master Degree: Impeachment in Indonesia and the United States: A Comparative Study*. Malaysia: International Islamic University.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada pembukaan seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta.
- _____. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

- _____. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1997. *Imu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius.
- _____. 2002. Disertasi : *Kedudukan dan Materi Muatan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Dan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Republik Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Refly Harun, dkk (Editor). 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press.
- Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PMK/2006 Tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PMK/2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kamus :

Marjanne Termorshuizen. 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia, cet-2*. Jakarta: Djambatan.

Internet :

<http://www.djpp.depukumham.go.id>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel-2/wajah-hukum-indonesia>

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>